



## BRI dan Peran Mediasi Cina: Analisis Kepentingan Nasional dalam Konflik Palestina-Israel

Ahmad Rifqih Ghazali

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, 90245, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan

Email : [ahmadrifqih22@gmail.com](mailto:ahmadrifqih22@gmail.com)

**Abstract** *The Belt and Road Initiative (BRI) is China's foreign policy introduced during the administration of Xi Jinping. This policy represents China's efforts to expand cooperation in the economic sector and aims to shift the United States' hegemony, both in security and particularly in the economic domain. The project spans across various regions, including the Middle East, a region abundant in energy resources and petroleum, prompting China to focus on collaboration with Arab nations. This approach has been positively received by countries in the Middle East as China adopts a proactive method without military intervention, concentrating solely on economic cooperation. Furthermore, China's recent appointment as the Chair of the United Nations Security Council presents an opportune moment. This positions China to play a more significant role in its extensive projects, serving as a mediator for peace in the Palestine-Israel conflict. This article seeks to address questions regarding China's interests as the Chair of the UN Security Council in the Palestine-Israel conflict, employing the theories of hegemonic stability and the concept of national interest.*

**Keywords:** *BRI, Cina, Middle East, National Interest*

**Abstrak** *Belt and Road Initiative (BRI) merupakan kebijakan luar negeri Cina yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Xi Jinping. Kebijakan ini merupakan upaya Cina untuk melakukan perluasan kerja sama di sektor ekonomi, dan juga berusaha menggeser hegemoni Amerika Serikat baik di bidang keamanan dan juga khususnya di bidang ekonomi. Proyek ini melintasi banyak kawasan, salah satunya Timur Tengah. Kawasan yang kaya akan sumber daya energi dan minyak bumi membuat Cina terus berfokus dalam melakukan kerja sama dengan negara-negara Arab. Hal ini disambut positif oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah karena metode yang dilakukan Cina lebih proaktif tanpa menggunakan intervensi militer dan hanya berfokus pada kerja sama ekonomi. Beruntungnya lagi, Cina baru-baru ini menjadi Ketua Dewan Keamanan PBB. Hal ini tentu menjadi peluang Cina untuk lebih melancarkan proyek besarnya dengan menjadi mediator perdamaian dalam konflik Palestina-Israel. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana kepentingan Cina sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB dalam konflik Palestina-Israel dengan menggunakan teori stabilitas hegemoni dan konsep kepentingan nasional.*

**Kata Kunci:** *BRI, Cina, Timur Tengah, Hegemoni, Kepentingan Nasional*

### 1. PENDAHULUAN

Cina merupakan salah satu negara yang beberapa dekade terakhir muncul sebagai negara dengan kekuatan aktivitas ekonomi dan politik yang cukup mendominasi. Di era kepemimpinan Xi Jinping, Cina kemudian memperkenalkan sebuah kebijakan bernama *Belt and Road Initiative* (BRI). Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk promosi Cina dalam diplomasi ekonomi ke seluruh negara (Anam dan Risyanti, 2018). BRI terbagi menjadi dua elemen utama, yaitu *the Silk Road Economic Belt* yang merupakan jalur darat dengan tujuan menghubungkan provinsi bagian barat Cina dengan Eropa melalui Asia Tengah dengan jalur kereta api. Sedangkan *the 21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road* merupakan rute laut yang menghubungkan provinsi Cina bagian pesisir dengan kawasan Asia Tenggara hingga Afrika melalui jalur laut (Syafriani dan Rendy, 2019). Keterlibatan kawasan Timur Tengah dalam

*Received: April 15, 2025; Revised: April 30, 2025; Accepted: Mei 21, 2025; Online Available: Mei 23, 2025*

jalur *the Silk Road Economic Belt* yang digagas Cina sangat masif. Adapun beberapa faktornya yaitu untuk membangun kemitraan ekonomi, dan juga ketergantungan Cina terhadap sumber daya gas dan minyak bumi. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya kerja sama Cina dengan negara-negara di Timur Tengah dalam bidang ekonomi. Tetapi, kerja sama antara Cina dengan negara-negara di Timur Tengah terjadi peningkatan hanya ketika ada perselisihan atau konflik di kawasan tersebut.

Beberapa tahun yang lalu, konflik antara Palestina dan Israel kembali menjadi perhatian dunia pasca serangan perlawanan Hamas pada 7 Oktober 2023. Konflik ini menimbulkan respon negara-negara dunia karena konflik ini telah memakan ribuan korban jiwa termasuk perempuan dan anak-anak. Banyak negara-negara besar ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah ini, termasuk Cina. Pada bulan November 2023, Cina mengambil alih kepemimpinan di Dewan Keamanan PBB. Zhang Jun, Duta Besar Cina untuk PBB mengungkapkan bahwa dalam keketuaannya, Cina akan melakukan berbagai upaya dalam rangka mencapai perdamaian dan keamanan, khususnya terkait dengan konflik di Gaza. Fokus utamanya adalah upaya dalam mencapai gencatan senjata, mengurangi korban berjatuhannya khususnya warga sipil, mengurangi bencana kemanusiaan, hingga mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Sehingga, dalam keketuaannya sebagai Dewan Keamanan PBB, Cina berpotensi tak hanya sebagai mediator perdamaian, tetapi juga ada kemungkinan upaya dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, dalam kasus ini, penulis menggunakan Teori Stabilitas Hegemoni dan konsep Kepentingan Nasional sebagai kerangka pendukung analisis berpikir. Berdasarkan data di atas, maka penulis ingin menganalisis lebih lanjut permasalahan dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana Kepentingan Cina sebagai Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Palestina-Israel?”

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan Teori Stabilitas Hegemoni dan konsep Kepentingan Nasional. Teori Stabilitas Hegemoni ini menjelaskan bahwa tatanan sistem dunia atau sistem internasional akan lebih tersistematis jika ada suatu negara yang menjadi kekuatan dunia yang dominan atau sebagai hegemon (Kartini, 2015). Maksudnya, dalam sistem internasional ini ada negara pemimpin bagi negara-negara lain. Negara yang menjadi pemimpin ini akan berusaha mendominasi berbagai bidang yang ada, seperti militer, ekonomi, politik, budaya, dan banyak bidang lainnya. Beberapa dekade terakhir, hegemoni Amerika Serikat mulai terguncang dengan hadirnya Cina sebagai aktor yang melakukan hegemoni khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan Cina yaitu BRI di mana

kebijakan ini Cina melakukan diplomasi ekonomi ke seluruh kawasan di dunia dan menjadi langkah Cina dalam mendominasi perekonomian dunia. Penulis juga menggunakan konsep Kepentingan Nasional. Konsep ini menjelaskan bagaimana setiap negara punya kepentingan dalam mengatur strategi hubungannya dengan negara lain. Dalam konteks hubungan internasional, kebijakan politik luar negeri dipengaruhi oleh kepentingan nasional suatu negara. Sehingga, konsep Kepentingan Nasional digunakan dalam menjelaskan bagaimana Cina sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB punya kepentingan untuk bisa lebih memuluskan kebijakan BRI di Timur Tengah. Apalagi, Cina dalam hal ini menyatakan keberpihakannya terhadap Palestina. Hal ini mengindikasikan ada kepentingan dari Cina dibalik keketuannya sebagai Dewan Keamanan PBB.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka seperti dokumen, artikel, laporan, jurnal ilmiah, dan situs internet. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan menghasilkan data deskriptif yang dikumpulkan oleh penulis dalam bentuk kalimat, dan kata-kata yang mendukung penjelasan mengenai topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dengan pendekatan kualitatif ini, penulis akan mengkaji bagaimana Cina sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB punya kepentingan di Timur Tengah terkhusus dalam konflik Palestina- Israel.

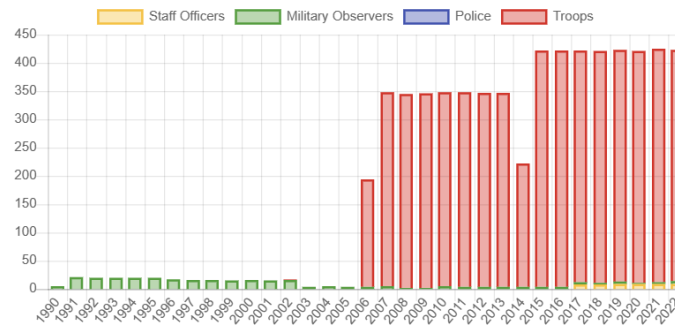
### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam beberapa dekade terakhir, hegemoni Amerika Serikat dalam bidang perekonomian mulai terguncang dengan kehadiran Cina. Salah satu kebijakan Cina dalam upayanya melakukan hegemoni ekonomi yaitu dengan memperkenalkan kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI). BRI ini merupakan proyek raksasa yang dikeluarkan Cina pada masa pemerintahan Xi Jinping. Tujuan dibentuknya kebijakan ini yaitu sebagai penghubung ekonomi Eurasia dengan infrastruktur, investasi, dan perdagangan. Adapun faktor pendorong dikeluarkannya kebijakan ini yaitu: Pertama, BRI sebagai salah satu upaya Cina menjadi negara hegemoni di bidang ekonomi dan keamanan, dalam hal ini Cina kemudian melancarkan banyak kerja sama dengan negara-negara di berbagai kawasan. Kerja sama ini mencakup pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan, rel kereta api, bandara, dan pembangkit listrik. Selain itu, proyek ini juga termasuk pembangunan jalur perdagangan laut dan darat yang kemudian menghubungkan Cina dengan banyak kawasan, termasuk Eropa, Asia Tengah, Afrika, hingga Timur Tengah. Kedua, ada kepentingan nasional Cina dalam upaya mendominasi jalur pasokan energi yang menghubungkan Cina dan Timur Tengah sekaligus menjajaki sumber energi alternatif di Asia Tengah. Hubungan antara Cina dengan

negara-negara di kawasan Timur Tengah cukup mesra akibat dari kebijakan ini. Hal ini dikarenakan metode yang dilakukan Cina lebih *soft* dibanding dengan Amerika Serikat dan benar-benar berfokus pada sektor kerja sama ekonomi. Hasyim (2020) mengungkapkan bahwa hegemoni suatu negara tidak lagi dinilai dari aspek kekuatan militernya, akan tetapi bagaimana suatu negara bisa menjaga stabilitas keuangan negaranya dan bisa menguasai perdagangan di dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa Cina kedepannya akan menggantikan kekuatan hegemoni Amerika Serikat.

Di samping itu, Cina juga melakukan upayanya di sektor keamanan. Namun, metode yang digunakan oleh Cina lebih berorientasi sebagai mediator perdamaian dan cenderung menghindari konflik, termasuk di Timur Tengah. Dalam konflik di Timur Tengah, Cina bisa saja menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang berkonflik. Misalnya saja Cina menjalin kerja sama dengan Israel, dan disaat yang bersamaan juga menjalin kerja sama dengan Palestina. Pada tahun 1950-an, Cina bersama dengan negara-negara Arab yang menolak Israel. Namun, Israel dan Cina mulai memperbaiki hubungan pada 1992. Hal ini dibuktikan dengan Israel sebagai negara pertama di Timur Tengah yang mendukung “Beijing’s One Cina” (Hasyim, 2020). Di waktu yang bersamaan, Cina juga memberikan dukungannya kepada Palestina. Ishtaye, selaku Perdana Menteri Palestina memuji Cina karena selalu menjadi pihak yang mendukung Palestina dan perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Tidak hanya dalam konteks Palestina-Israel, Cina juga melakukan hal yang sama pada konflik di Timur Tengah yang lain.

Siklus ini dilakukan Cina hingga hari ini. Beberapa waktu yang lalu, konflik antara Palestina- Israel kembali memuncak setelah serangan perlawanan Hamas pada 7 Oktober 2023. Cina dengan metode yang sama kemudian berusaha menjadi mediator perdamaian antar keduanya. Beruntungnya lagi, pada November 2023, Cina menjadi ketua Dewan Keamanan PBB. Hal ini tentu bisa memudahkan Cina sebagai mediator perdamaian. Zhang Jun selaku Duta Besar Cina untuk PBB menegaskan bahwa Cina akan berfokus dalam penyelesaian konflik di Gaza. Fokus utamanya adalah upaya dalam mencapai gencatan senjata, mengurangi korban berjatuhannya khususnya warga sipil, mengurangi bencana kemanusiaan, hingga mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel.



Grafik 1. Gambaran Kontribusi Cina dengan mengirimkan pasukan dan personel lainnya untuk operasi penjaga perdamaian PBB di Timur Tengah Sumber: cinamed.it, 2023

Berdasarkan gambaran grafik di atas, Cina hampir secara konsisten mengirimkan pasukan dan personel lainnya ke Timur Tengah untuk operasi penjaga perdamaian. Konsistensi Cina dilakukan setelah Xi Jinping memperkenalkan kebijakan BRI. Hal ini tidak lepas dari kepentingan Cina di Timur Tengah sebagai kawasan sumber energi dan minyak bumi. Kepentingan Cina di Timur Tengah ditanggapi secara positif karena metode Cina yang bisa dibilang lebih mulus dibanding dengan Amerika Serikat. Bahkan, survei dari Pew Research Center mengungkapkan lebih dari setengah penduduk Palestina memandang positif kehadiran Cina ketimbang Amerika Serikat. Sehingga, keketuaan Cina sebagai Dewan Keamanan PBB akan sangat menguntungkan bagi Cina. Secara tidak langsung, jika Cina berhasil menjadi mediator perdamaian antara konflik Palestina-Israel, maka hegemoni Amerika Serikat akan tersingkir, ditambah lagi hubungan negara-negara di Timur Tengah dengan Cina akan menjadi lebih mesra, dan proyek BRI akan menjadi proyek jangka panjang yang sangat menguntungkan.

## 5. KESIMPULAN

Kebijakan BRI dari Cina menjadi upaya dalam melakukan hegemoni di sektor ekonomi. Di Timur Tengah, kerja sama Cina dengan negara-negara Arab disambut positif karena metode Cina yang lebih proaktif dengan intervensi non-militer. Hal ini ditandai dengan Cina tetap melakukan kerja sama dengan aktor-aktor yang sedang berkonflik. Dalam konflik Palestina-Israel, Cina hadir sebagai mediator perdamaian. Keketuannya sebagai Dewan Keamanan PBB membuat Cina akan lebih mudah menjalankan kepentingannya. Jika Cina kemudian berhasil menjadi mediator perdamaian antara Palestina dan Israel, akan membuat hegemoni Amerika Serikat dengan cepat tergeser, kemudian negara-negara di dunia terkhusus di kawasan Timur Tengah akan memberikan respon positif dan akan membuka keran-keran baru dalam hubungan bilateral dengan Cina. Bahkan, proyek BRI akan menjadi mega proyek yang berpotensi proyek jangka panjang Cina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasyim, M. M. (2020). Upaya Tiongkok untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra dalam perspektif balance of power. *Jurnal ICMES*, 4(1), 64–84.
- Ali, M. (2024). Cina's strategic engagement in the Middle East: Navigating the Belt and Road Initiative and US leverage of the Abraham Accords. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 1–18.
- Anam, S., & Ristiyani, R. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(2), 217–236.
- BBC Indonesia. (2023, November 5). Palestina: Apa yang diinginkan Cina dari meningkatnya eskalasi tempur Israel-Hamas. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy010zz1ymro>
- Chaziza, M. (2020). *China's Middle East diplomacy: The Belt and Road strategic partnership*. Liverpool University Press.
- CNBC Indonesia. (2023, November 6). Diplomasi senyap ala Cina dalam perang Hamas vs Israel. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231106145126-4-486737/diplomasi-senyap-ala-cina-dalam-perang-hamas-vs-israel>
- DetikNews. (2023, November 9). Di mana Cina berpijak dalam konflik Israel-Palestina? *Detik*. <https://news.detik.com/dw/d-7027205/di-mana-cina-berpijak-dalam-konflik-israel-palestina>
- Evron, Y. (2019). The challenge of implementing the Belt and Road Initiative in the Middle East: Connectivity projects under conditions of limited political engagement. *The China Quarterly*, 237, 196–216.
- Forough, M. (2023). The 2023 Israeli-Palestinian war: A gift to China. [Jenis publikasi atau sumber perlu dilengkapi jika tersedia].
- Habibi, N. (2022). The Belt and Road Initiative in the Eastern Mediterranean: China's relations with Egypt, Turkey, and Israel. *Middle East Briefs*, 33970. [Publisher atau lembaga perlu ditambahkan jika tersedia].
- Jia, W., & Hassan, A. A. (2025). Navigating the crossroads: Analyzing China's Middle East policy in the Palestinian-Israeli conflict context. *Contemporary Review of the Middle East*, 23477989241311334. <https://doi.org/10.1177/23477989241311334>
- Kartini, I. (2016). Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan implikasinya bagi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(2), 131–147.
- Muhaimin, R., Umar, N., & Ayuningtyas, D. (2022). Dunia Islam di antara rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 7(2), 73–104.
- Rózsa, E. N. (2021). China's interests in the Middle East and North Africa. [Sumber atau publisher perlu dilengkapi jika tersedia].

- Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & Surryanto, D. W. (2018). Diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(3), 83–102.
- Syafriani, S., & Kusuma, R. P. (2019). Pencapaian Tiongkok di Timur Tengah terkait The Silk Road Economic Belt: Studi kasus pembangunan infrastruktur transportasi kereta api terhadap Iran periode 2013–2018. *Balcony*, 3(2), 101–113.
- VOA Indonesia. (2023, November 2). Dewan Keamanan PBB, Cina bertekad upayakan gencatan senjata di Gaza. <https://www.voaindonesia.com/a/pimpin-dewan-keamanan-pbb-cina-bertekad-upayakan-gencatan-senjata-di-gaza/7338376.html>